

SARKEM FEST 2024:
Peserta mengikuti kirab Pasar Kembang (Sarkem) Fest 2024 di Yogyakarta, Jumat (1/3/2024). Kegiatan yang menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya tersebut dalam rangka promosi potensi pariwisata Kawasan Sosrowijayan dan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta.



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

CEGAH TERJADINYA POLITISASI KASUS Jaksa Agung Dilarang Diisi Pengurus Parpol

JAKARTA (KR) - Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi jaksa. Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat. Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi 'Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung'.

Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, putusan MK yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) tersebut sudah tepat. Putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus. "Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/3). Uchok membandingkan kinerja Kejaksaan yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus. "Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum," ucapnya. (Ant/Has)-d

RODA DUA NAIK 262 PERSEN

Populasi Kendaraan Listrik Meningkat

JAKARTA (KR) - Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) meningkat pesat pada 2023, dengan penambahan roda dua mencapai 262 persen.

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Hendro Martono mengungkapkan, jumlah kendaraan listrik roda dua bertambah dari 17.000 pada 2022 menjadi 62.000 pada 2023.

"Peningkatan ini salah satunya berkat kesuksesan program bantuan Pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua," ujar Hendro dalam sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat (1/3).

Insentif yang diberikan Pemerintah kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik roda

dua berupa potongan Rp 7 juta per unit.

Sementara itu, penambahan populasi kendaraan listrik roda empat pada 2023 meningkat 43 persen. Ia menyebut ada peningkatan dari 8.000 unit pada 2022 menjadi 12.000 unit pada tahun lalu.

Namun, Hendro menilai meskipun Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif, penambahan ini belum cukup untuk meningkatkan jumlah KBLBB di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan program insentif baru, yaitu program insentif bea masuk dan pajak penjualan ba-

rang mewah (PPnBM) sebesar 0 persen.

Insentif ini berlaku untuk impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dan terurai lengkap (completely knocked down/CKD), dengan nilai komponen lokal atau tingkat kandungan dalam negeri/TKDN di bawah 40 persen. Insentif lain yang telah diberikan, di antaranya tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang memproduksi KBLBB sebesar 100 persen.

Kemudian, tax allowance atau pengurangan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang melakukan investasi di industri KBLBB 50 persen, dan PPN ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Analisis Kebijakan Ahli Madya

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan, Pemerintah mendukung habis-habisan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam negeri dengan memberikan berbagai insentif. "Kami tidak main-main untuk mobil listrik, dukung habis-habisan. Berbagai macam insentif, pajak pusat-pajak daerah (diberikan)," kata Rustam.

Insentif yang diberikan Pemerintah, antara lain bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

(Ant/San)-d

LEPAS DARI ZONA DEGRADASI Arema FC Hatrik Kemenangan

BANTUL (KR) - Arema FC melanjutkan catatan positif di pekan ke-27 BRI Liga 1 2023/2024. Menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung Bantul, Jumat (1/3), Arema FC menang tipis dengan skor 1-0.

Arema FC pun mencetak hatrik kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Sebelumnya Arema FC sudah lebih dahulu mengalahkan Rans Nusantara dengan skor 3-2 pada pekan ke-25 dan menang atas Persija Jakarta 3-2 di pekan ke-26.

Imbang tanpa gol di babak pertama, Arema FC menghentak di paruh kedua. Saat laga babak kedua baru berjalan tiga menit, Arema FC membuat gol keunggulan melalui Charles Lokolingoy. Persikabo bekerja keras untuk menyamakan kedudukan, namun usaha mereka kerap kali menemui jalan buntu.

Arema FC beberapa kali mengancam untuk mengandakan keunggulan. Hanya saja hingga laga berakhir, keunggulan 1-0 Arema FC tak bertambah. Kemenangan ini membuat Arema FC sementara keluar dari zona degradasi.

Arema FC naik ke posisi 15 dengan 30 poin, unggul dua poin dari Persita Tangerang di posisi ke-16. Sementara Persikabo masih di zona degradasi ada di posisi 17 dengan 17 poin. (Yud)-d

SINAU SEJARAH 1 MARET, HARI PENEKAKAN KEDAULATAN NEGARA Hari Besar Milik Indonesia, Tidak Hanya Yogyakarta



KR-Wawan Isnawan

Dialog Keistimewaan bertema 'Penegakan Kedaulatan Negara' di SMA Negeri 10 Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diperingati setiap 1 Maret mungkin masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Padahal ada peristiwa sejarah sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terjadi di Yogyakarta. Serangan itu membuktikan kepada dunia internasional, bahwa Republik Indonesia masih ada dan berdaulat.

"Menjadi tugas kita bersama, termasuk para pelajar, mensosialisasikan setelah tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, untuk mengetahui bersama-sama makna di balik penetapan itu," kata Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY, Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY). Buku diserahkan oleh Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY) kepada Eri Iwandiyati SPd MPd (Guru Sejarah SMA Negeri 10). Kegiatan ini didanai dengan dana keistimewaan (danais).

Kegiatan sinau sejarah ini diselenggarakan Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY, dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. Kegiatan ini diawali pemutaran video dokumenter berjudul 'Jejak-jejak Perjuangan'. Setelah itu digelar Dialog Keistime-

waan bertema 'Penegakan Kedaulatan Negara' dengan narasumber Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY), Julianto Ibrahim SS MHum (Sejarawan UGM) dan Widihaso Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan) dipandu moderator Wiji Rachmadani.

Acara dimeriahkan persembahan Tari 'Senyum Indonesia' dibawakan Aulia dan Floria serta pembacaan cerkak 'Aja Lirwa' oleh Arbaatun Nida Adya Nurbaiti, siswa SMA Negeri 10 Yogya. Di penghujung acara tampil bintang tamu Musik Kerongcong Cringcrung.

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan kenang-kenangan berupa buku keistimewaan DIY dari Paniradya Kaistimewan DIY. Buku diserahkan oleh Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY) kepada Eri Iwandiyati SPd MPd (Guru Sejarah SMA Negeri 10).

Para peserta (Sahabat Istimewa) yang mengikuti Sinau Sejarah Keistimewaan DIY ini bisa mendapat *free e-sertifikat* dari Corporate University Paniradya Kaistimewan DIY.

Lebih lanjut Ariyanti Luhur Tri Setyarini yang akrab disapa Rinin mengatakan, sebelum Pemerintah Daerah DIY mengusulkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara,

terlebih dahulu dilakukan kajian. Dari kajian itu diketahui bahwa peran Yogyakarta dalam memberikan penajangan terhadap kedaulatan NKRI sangat luar biasa. Begitu pula peranan yang sangat besar dari Sultan HB IX yang menginisiasi Serangan Umum 1 Maret 1949.

Maka pada tanggal 24 Februari 2022 turunlah Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang menetapkan 1 Maret Hari Besar Nasional sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. "Ini adalah hari besar milik Republik Indonesia, tidak hanya milik Yogyakarta saja," tandasnya.

Dijelaskan Rinin, setiap tanggal 1 Maret di DIY dilakukan upacara memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Semestinya upacara peringatan itu tidak hanya dilakukan di DIY tapi di seluruh Indonesia, seperti halnya peringatan Hari Pahlawan, 10 November. Karena Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini memiliki semangat penegakan kedaulatan bangsa, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih punya harga diri, punya nilai, dan semangat sebagai negara kuat.

"Semangat inilah yang harus terus dimiliki oleh bangsa Indonesia dan ditularkan ke semua lapisan masyarakat melalui ditetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Semangat ini harus terus kita kobarkan," katanya.

Sementara itu, Sejarawan UGM Julianto Ibrahim SS MHum yang juga menjadi

salah satu anggota tim yang membuat naskah akademik Serangan Umum 1 Maret menjelaskan secara singkat sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949, yang muaranya adalah Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya.

Dikatakan, hal paling penting dalam Serangan Umum 1 Maret tersebut adalah bisa menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih ada, TNI masih kuat. Karena sejak Belanda melalui NICA memboncong Sekutu untuk menjajah Indonesia lagi, diplomat Belanda yang dipimpin Van Royen selalu melancarkan propaganda di PBB yang mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada, dan rakyat Indonesia mau menerima Belanda.

Dijelaskan, meskipun

Sultan HB IX yang mengetahui bahwa pada akhir Februari 1949 akan ada Sidang Umum PBB, punya keinginan agar saat Sidang Umum PBB itu, dunia tahu bahwa bangsa Indonesia masih ada. Maka pada awal Februari diutuslah kurir ke Jenderal Sudirman yang saat itu masih bergerilya, agar ada serangan serentak yang dilakukan pada siang hari, sehingga dampaknya signifikan.

Jenderal Sudirman pun setuju dan meminta agar Sultan HB IX berkoordinasi dengan komandan setempat yaitu Letkol Suharto. Pada 13 Februari 1949, Sultan HB IX mengundang Letkol Suharto untuk membicarakan serangan itu dan terwujud pada 1 Maret 1949.

Dijelaskan, meskipun

Serangan Umum 1 Maret itu hanya mampu menguasai Yogyakarta selama enam jam, namun berita terkait serangan itu yang disebarkan lewat radio di Playen Wonosari, terdengar ke dunia internasional. Dewan Keamanan PBB kemudian meminta diadakan perundingan pada 7 Mei 1949 yang dikenal dengan Perjanjian Roem Royen, yang mengembalikan ibukota negara ke Yogyakarta yang dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali. "Kemudian melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia," katanya.

Sedangkan Widihaso Wasana Putra mengatakan, pelajar SMA Negeri 10 Yogyakarta seharusnya bangga karena bersekolah di sekolah yang di sekelilingnya banyak terdapat situs-situs

bersejarah.

Seperti Korem 072/Pamungkas dulu pernah menjadi kantor Wakil Presiden Mohammad Hatta, saat ibukota negara di Yogyakarta. Di depannya ada Istana Negara yang dahulu adalah kantor perwakilan Gubernur Jenderal Belanda. Di depan Istana Negara, ada Benteng Vredenburg yang dibangun pada era Sultan HB I dan disempurnakan di era Sultan HB II.

"Banyak heritage di kawasan ini. Harapan kepada generasi muda cintailah sejarah, jangan mengabaikan sejarah adalah masa lalu, melainkan harus dikenang agar bisa mengambil pelajaran dan hikmah untuk mengisi hari depan yang lebih baik lagi," katanya. (Dev/Wan)



KR-Wawan Isnawan

Tari Senyum Indonesia.



KR-Wawan Isnawan

Pembacaan cerkak 'Aja Lirwa'.



KR-Wawan Isnawan

Penampilan Musik Kerongcong Cringcrung.



KR-Wawan Isnawan

Penyerahan buku keistimewaan DIY.